

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama dari karya ilmiah ini menggambarkan secara umum proses penyusunan dengan merinci elemen-elemen penting sesuai dengan judul penelitian yang akan dianalisis secara mendalam. Penulis dengan cermat menyusun bab tersebut menjadi kerangka yang terstruktur dan komprehensif. Secara keseluruhan, bab pertama menjadi landasan yang kokoh dan informatif, memberikan gambaran menyeluruh tentang esensi dan relevansi penelitian yang akan diuraikan lebih rinci pada bagian-bagian berikutnya.

Pertama-tama, latar belakang penelitian digambarkan dengan seksama, memberikan konteks yang jelas terhadap landasan atau dasar dari penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah diuraikan dengan teliti, mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam kerangka kajian ini. Selanjutnya, penulis merinci tujuan penelitian, memberikan pencerahan mengenai hasil yang diharapkan dan dampak yang diinginkan dari penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, penelitian ini ditempatkan dalam konteks manfaatnya, menjelaskan kontribusinya terhadap pemahaman atau peningkatan pada bidang tertentu. Terakhir, bab pertama ini menutup dengan sistematika penulisan yang terperinci, memberikan panduan mengenai struktur keseluruhan karya ilmiah ini.

1.1 Latar Belakang

Sierra Leone adalah negara di Afrika Barat yang merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1961. Terletak di Afrika Barat, negara ini berbatasan dengan Liberia di tenggara dan Guinea di utara. Dengan luas sekitar 71.740 km², ibu kotanya adalah Freetown. Sierra Leone kaya akan sumber daya alam, tetapi yang paling berharga adalah berlian. Penambangan berlian dimulai pada tahun 1935 dan dikelola oleh perusahaan De Beers. Namun, setelah merdeka pada tahun

1961, masalah penyelundupan berlian menjadi tantangan ekonomi utama bagi Sierra Leone.

Penduduk Sierra Leone terdiri dari berbagai macam kelompok etnis Afrika, dengan asal-usul dan praktik kebudayaan yang berbeda. Kelompok etnis tersebut diantaranya Fullah, Gola, Kissi, Kono, Koranko, Krim, Krio, Limba, Loko, Mandingo, Mende, Sherbro, Susu, Temne, Vai, dan Yalunka. Adapun dua kelompok etnis terbesar yaitu Mende dan Temne. Orang-orang Mende, menetap sebagian besar di bagian selatan negara. Sedangkan Temne, penduduknya sebagian besar berada di wilayah utara negara - membentuk sekitar 60% dari populasi. Suku Krio, yang merupakan keturunan budak yang dibebaskan, menetap di daerah Freetown pada akhir abad ke-18 dan merupakan 10% dari total populasi. Sierra Leone adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (sekitar 60%) dengan sisa penduduk yang menganut agama Kristen (30%) dan agama-agama asli (10%). Tingkat melek huruf di Sierra Leone rendah, yaitu 49% untuk pria dan 29% untuk wanita (Statistik Sierra Leone, 2005).

Pada tahun 1968, Siaka Stevens menjadi perdana menteri Sierra Leone dan memerintah negara ini dengan sistem partai tunggal. Pembentukan Partai Kongres Rakyat (APC) di bawah kepemimpinan Stevens membawa perubahan kebijakan dalam penambangan berlian, yang sebagian malah merugikan ekonomi negara. Di awal pemerintahannya, kekuasaan Stevens menghadapi tantangan dari kepala suku lokal yang berkuasa dan para pendukung mereka, terutama dari Partai Rakyat Sierra Leone (SLPP) di Provinsi Timur. Banyak kepala suku dan pengikutnya telah memperoleh kekayaan melalui MADA dan ingin mempertahankan situasi tersebut. Namun, Stevens dan APC percaya bahwa untuk memperkuat kekuasaan, pengelolaan penambangan berlian harus dipindahkan dari tingkat lokal ke tingkat nasional (Wilson, 2013, hlm. 1002).

Pada saat kemerdekaan, sistem politik didominasi oleh dua partai besar - Partai Rakyat Sierra Leone (SLPP) yang mendapatkan sebagian besar dukungan dari selatan negara, dan Kongres Semua Rakyat (APC) yang mendapatkan mayoritas dukungan dari utara. Perdana Menteri pertama Sierra Leone yang merdeka adalah Milton Margai dari SLPP. Margai, seorang dokter medis yang dilatih Inggris, mengecilkan arti penting kemerdekaan, mungkin untuk

mengurangi ekspektasi, ketika ia menyatakan: 'kehidupan harus tetap berjalan dengan cara yang sama, dengan hakim yang sama di pengadilan, pajak yang sama, dan tanggung jawab lainnya' (Gberie 2005, hal. 20). Margai meninggal pada tahun 1964 dan digantikan oleh saudaranya, Albert Margai, yang juga berasal dari SLPP, yang pemerintahannya dari tahun 1964 hingga 1967 dirusak oleh patronase, taktik otoriter, dan korupsi.

Kekerasan, militerisasi, dan korupsi telah melanda politik Sierra Leone. Sierra Leone diperintah oleh APC dari tahun 1967 hingga 1991, dipimpin oleh Siaka Stevens (1967-1984) dan kemudian oleh penggantinya yang dipilih sendiri, Joseph Momoh (1985-1991). Terlepas dari klaim mereka untuk membawa akuntabilitas dan transparansi ke dalam politik, pemerintahan mereka terbukti merupakan sistem penindasan dan eksploitasi dengan korupsi dan patrimonialisme yang menabur benih-benih ketidakpuasan rakyat (Abdullah 2004; Kpundeh 2004). Masa jabatan Stevens yang panjang ditandai dengan kemerosotan ekonomi, meningkatnya otoritarianisme politik, pencabutan hak-hak rakyat Sierra Leone, dan pelembagaan apa yang disebut oleh Reno (1995, hlm 54) sebagai "negara bayangan" (*shadow state*). Negara bayangan bekerja untuk mengendalikan pasar-pasar informal dan operasi-operasi ekonomi klandestin yang menyediakan sumber daya patronase yang dibutuhkan oleh 'orang-orang besar' dalam pemerintahan untuk mendistribusikan dan mengendalikan para pengikutnya (Murphy 2003, hlm 54).

Melalui sistem patrimonial berupa jatah bantuan, pencurian dana publik, pembayaran gelap, serta suap dari distorsi ekonomi (yang disebabkan oleh kontrol harga dan alokasi administratif komoditas dasar seperti beras dan bahan bakar), korupsi menjadi terlembagakan (Aning dan McIntyre 2004). Hal ini terlihat jelas pada sebagian besar perilaku dan aktivitas Stevens, termasuk salah urus industri berlian. Pada tahun 1971, Stevens membentuk Dewan Pertambangan Berlian Nasional, yang secara efektif menasionalisasi industri ini melalui kontrol atas Sierra Leone Selection Trust (Smillie et al. 2000, hlm 55). Produksi dan ekspor berlian resmi anjlok dari 2 juta karat pada tahun 1970 menjadi 48.000 karat pada tahun 1988 (Smillie et al. 2000). Pendapatan yang seharusnya diinvestasikan

untuk infrastruktur sosial negara malah terakumulasi di kantong para politisi korup di Freetown dan rekanan bisnis asing mereka (Rashid 1997, hlm 55).

Selain itu, pada periode pasca-kemerdekaan, para kepala suku menjadi sangat terkait dengan kecenderungan kleptokratis dan patrimonial dari elit Freetown. Dalam sistem kepala suku, keluarga-keluarga yang berkuasa mencari dukungan moral dan politik dari warga lokal untuk memenangkan pemilihan kepala suku. Setelah pemilihan, sudah menjadi hal yang lumrah jika kelompok-kelompok pendukung ini diberikan 'keuntungan' (Jackson 2006). Sistem kepala suku, bersama dengan jaringan patrimonial, menghasilkan kelompok-kelompok besar masyarakat yang tersisih dan terpinggirkan, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dengan sedikit harapan untuk maju. Bank Dunia (2003, h. 44) mencatat bahwa kekuasaan kepala suku menyebabkan 'salah urus, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegagalan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan yang terdesentralisasi', yang sangat dirasakan oleh kaum muda di pedesaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum adat dan sistem patrilineal memungkinkan para tetua untuk melakukan kontrol yang kuat terhadap generasi muda, terutama bagi kaum muda dari garis keturunan yang lebih lemah, dan menghalangi mereka untuk mendapatkan akses terhadap tanah, dan hak untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala suku.

Meskipun Sierra Leone memiliki cadangan berlian jenis gemstone yang berlimpah, sumber daya ini tidak berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Negara ini menghadapi berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi, seperti korupsi dan pemerintahan yang otoriter. (Williams, 1999, hlm.147). Pemerintahan yang terpusat di ibu kota Freetown menyebabkan masyarakat di luar kota tersebut terpinggirkan, sehingga mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Akibatnya, kesejahteraan yang merata sulit dicapai, dan hak-hak serta kebebasan masyarakat Sierra Leone, seperti akses pendidikan dan pekerjaan, menjadi terbatas. (Iro, 2009, hlm 33).

Fondasi dari kemiskinan yang brutal serta kesehatan dan kesejahteraan sosial yang suram adalah kompleks, memiliki banyak sisi dan terkait erat dengan penjajahan, negara yang lemah dan korup, keruntuhan kelembagaan, kekerasan struktural, bahkan banyak faktor yang sama yang berkontribusi terhadap perang

saudara selama 11 tahun di negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, kerapuhan institusional yang sudah berlangsung lama dari apa yang disebut sebagai 'negara bayangan' oligarki Sierra Leone (Reno 1995, hlm 49) dirusak oleh korupsi yang menopangnya.

Dengan tata kelola pemerintahan yang buruk dan salah urus, Sierra Leone menjadi terjebak dalam stagnasi ekonomi yang kronis, pengangguran yang tinggi, dan pengikisan masyarakat sipil secara bertahap. Kondisi ini menyebabkan kekecewaan yang memuncak, terutama di kalangan kaum muda, dan menjadi resep bagi pemberontakan dan perang saudara yang brutal yang pada akhirnya menyebabkan kematian sekitar 70.000 orang, pengungsian lebih dari 2 juta orang, amputasi lebih dari 10.000 orang, serta penghancuran infrastruktur negara yang terbatas (Hanlon 2005, hlm 50).

Masalah kesejahteraan dan marginalisasi menciptakan ketidakadilan sosial yang berujung pada perang sipil di Sierra Leone antara tahun 1992 hingga 2002. Persaingan untuk menguasai sumber daya berlian membuat negara ini terjebak dalam konflik selama beberapa dekade. Berlian, meskipun hanya berupa potongan kecil karbon, menjadi penyebab kematian, kehancuran, dan penderitaan luas selama hampir sepuluh tahun di Sierra Leone. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, demokrasi yang rapuh pascakemerdekaan digantikan oleh pemerintahan despotik dan korupsi yang merajalela. Ekonomi menurun dan kekuasaan militer semakin meningkat. Pemberontakan yang dimulai pada tahun 1991 ditandai dengan kekerasan dan kebrutalan yang mengerikan, terutama terhadap warga sipil. Antara tahun 1991 dan 1999, perang menyebabkan lebih dari 75.000 kematian, membuat setengah juta orang menjadi pengungsi, dan memaksa setengah dari 4,5 juta penduduk negara itu mengungsi. (Ian Smillie 2000, hlm.24).

RUF (Revolutionary United Front) memainkan peran kunci dalam perebutan kekuasaan atas berlian di Sierra Leone. Pemberontakan yang dipimpin oleh RUF ini menyebabkan dampak yang sangat besar. Perang saudara dimulai pada tahun 1991 dan berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Selama konflik, baik tentara nasional maupun RUF, yang bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terburuk, menculik anak-anak dari desa-desa yang mereka serang. Diperkirakan antara 15.000 hingga 22.000 anak diambil dari keluarga mereka dan dipaksa

bekerja untuk kelompok militer, dari tugas rumah tangga hingga tindakan kekerasan. Banyak dari mereka mengalami pelecehan seksual dan dipaksa mengonsumsi alkohol serta obat-obatan terlarang (Betancourt 2009, hlm. 565).

Konflik yang terjadi di Sierra Leone ini banya sekali merekrut anak-anak sebagai tentara, baik dipaksa maupun tidak. Misi Perdamaian PBB di Sierra Leone (UNAMSIL) mengindikasikan bahwa terdapat 10.000 anak terlibat dalam berbagai faksi yang bertikai (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone, 2004, hlm 235) dan UNICEF juga memperkirakan bahwa 6.000 anak dipaksa mengikuti wajib militer. McKay (2004) mengindikasikan bahwa 48.000 anak direkrut ke dalam konflik. Pada akhirnya, jumlah pasti anak-anak yang berada di dalam angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok 'tidak mungkin untuk dihitung, karena banyak anak-anak yang kemungkinan besar tewas selama pertempuran atau melarikan diri tanpa pernah diidentifikasi sebagai tentara (UNICEF, 2005, hal. ix).

Foday Sankoh, pemimpin kelompok RUF, melancarkan serangan dari timur dekat perbatasan Liberia untuk menggulingkan pemerintah Sierra Leone. Gerakan ini didukung oleh National Patriotic Front of Liberia (NPFL) yang dipimpin oleh Charles Taylor dan menggunakan Liberia sebagai markas mereka. Akibatnya, rakyat Sierra Leone menderita berat karena perlakuan brutal dari RUF, yang tidak ragu membunuh dan melukai ribuan orang. Saat konflik dimulai, militer Sierra Leone, dibantu oleh ECOWAS dan pengamat militer ECOMOG, berusaha melindungi pemerintah dan mengalahkan para pemberontak.

Pada tahun 1995, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Berhanu Dinka dari Ethiopia sebagai utusan khusus. Dia bekerja sama dengan AU dan ECOWAS untuk meyakinkan militer agar menyerahkan kekuasaan dan mengadakan pemilihan umum pada Februari 1996. Pada bulan yang sama, militer menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih, Ahmed Tejan Kabbah. Sankoh menandatangani Perjanjian Perdamaian Abidjan pada 30 November 1996. Namun, pada tahun 1997, militer melakukan kudeta lagi dengan dukungan dari RUF yang telah menguasai sebagian besar wilayah timur Sierra Leone (Woods 2008, hlm.32).

Karena situasi di Sierra Leone terus-menerus memburuk dan mengganggu stabilitas ekonomi serta politik negara tersebut, diperlukan upaya menyelesaikan konflik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik ini melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, kelompok pemberontak, komunitas internasional, dan organisasi regional seperti PBB, AU, dan ECOWAS. Upaya penyelesaian dimulai pada tahun 1995 dengan intervensi dari ECOWAS dan ECOMOG serta dukungan PBB pada tahun 1996. Bantuan dari pihak luar berhasil memfasilitasi perundingan damai yang menghasilkan Perjanjian Damai Abidjan dan pemilihan umum pertama selama perang. Namun, dua bulan setelah perjanjian tersebut, konflik kembali terjadi. Pemerintah dan RUF kemudian menandatangani perjanjian damai baru di Togo pada Juli 1999, yang dikenal sebagai Perjanjian Damai Lomé.

Salah satu pihak yang berperan dalam upaya perdamaian di Sierra Leone adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keterlibatan PBB dimulai pada Februari 1998, ketika ECOMOG melancarkan serangan untuk menanggapi serangan kelompok pemberontak, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Junta. Pada 10 Maret 1998, Presiden Kabbah dikembalikan ke jabatannya. Pada 13 Juli 1998, PBB membentuk United Nations Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL) untuk periode awal enam bulan. Sekretaris Jenderal PBB kemudian menunjuk Duta Khusus PBB dari Uganda, Mr. Francis G. Okelo, sebagai Utusan Khusus, serta Brigadir Jenderal Subhash C. Joshi dari India sebagai Kepala UNOMSIL.

UNOMSIL telah melakukan banyak upaya untuk perdamaian di Sierra Leone. Namun, Sekretaris Jenderal PBB merasa perlunya peningkatan upaya penjagaan perdamaian untuk mempertahankan keadaan damai yang sudah ada. Jadi, sesuai dengan Resolusi DK PBB 1270 (1999) pada 22 Oktober 1999, PBB membentuk misi pasukan perdamaian baru bernama UNAMSIL (*United Nations Mission in Sierra Leone*) sebagai kelanjutan dari UNOMSIL. Oluyemi Adeniji dari Nigeria ditunjuk sebagai Utusan Khusus Sekjen dan kepala misi UNAMSIL. Vijay Kumar Jetey dari India diangkat sebagai komandan pasukan pengamat militer, sedangkan Joseph Dankwa dari Ghana menjadi kepala pasukan kepolisian.

Markas UNAMSIL terletak di kota Freetown. (*First Report On The United Nation Mission In Sierra Leone*(UNAMSIL), 1999, hlm 1).

UNAMSIL memiliki tugas yang mirip dengan UNOMSIL, tetapi dengan beberapa tambahan mandat untuk melakukan tindakan penting. Misi ini diizinkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan melindungi personelnnya, serta memberikan perlindungan kepada warga sipil dari ancaman kekerasan perang dan fisik. Selain itu, UNAMSIL bertanggung jawab untuk mendorong Pemerintah Sierra Leone agar ikut serta dalam perlindungan tersebut. UNAMSIL bisa dianggap sebagai contoh model perdamaian yang berhasil, mirip dengan jenis-jenis misi penjagaan perdamaian PBB yang telah banyak mendapat perhatian. Sesuai mandatnya, misi ini terlibat dalam melucuti ribuan mantan pemberontak dengan bekerja sama dengan pasukan regional ECOMOG.

Pengangkatan UNAMSIL sebagai topik memiliki beberapa alasan. Pertama, kajian mengenai peran United Nation Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) dalam periode 1999-2005 belum banyak diulas secara mendalam oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian Anda dapat memberikan sumbangan berharga terhadap literatur ilmiah dalam bidang perdamaian dan konflik. Kedua, Pemilihan topik ini didorong oleh signifikansinya dalam konteks sejarah Sierra Leone. Misi penjaga perdamaian ini terjadi pada periode yang penting dalam sejarah negara tersebut, dan oleh karena itu, memahami peran UNAMSIL dapat memberikan perspektif yang mendalam terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Sierra Leone. Ketiga, skripsi ini dipilih karena peran PBB dalam misi penjaga perdamaian memiliki dampak global. Memahami bagaimana UNAMSIL beroperasi di Sierra Leone dapat memberikan wawasan terhadap tantangan dan keberhasilan organisasi ini dalam mengelola konflik bersenjata, yang relevan untuk konteks perdamaian global dan tugas PBB di seluruh dunia. Berdasarkan keterangan diatas, penulis ingin menelusuri lebih dalam lagi terkait dengan peranan dalam melakukan upaya perdamaian di Sierra Leone dalam penelitian yang berjudul “Peranan United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL) dalam Operasi Penjaga Perdamaian Tahun 1999-2005”.

Adapun tahun 1999 dipilih karena di tahun tersebut PBB mengerahkan upaya sepenuhnya untuk mewujudkan perdamaian di Sierra Leone berdasarkan Lome Peace Accord setelah adanya konflik Black Diamond dengan membentuk UNAMSIL yang memiliki mandat yang lebih luas. Tahun 2005 dipilih karena pada tahun tersebut penyelenggaraan misi perdamaian oleh UNAMSIL ini telah selesai dilaksanakan dengan membawakan dampak yang cukup signifikan di kawasan Sierra Leone baik berupa kestabilan politik, keamanan, dan kesejahteraan penduduk. UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) merupakan topik yang sangat penting untuk diangkat menjadi skripsi karena memiliki dampak yang signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas di Sierra Leone.

Penelitian mengenai konflik di Sierra Leone sudah banyak dikaji sebelumnya. Iro (2009) dalam thesis nya menulis mengenai penilaian terhadap Komisi Bangunan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The Peacebuilding Commission (PBC) dan Dana Bangunan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Peacebuilding Fund (PBF) dengan menganalisis kinerja mereka selama dua tahun terakhir di Sierra Leone, salah satu negara fokus PBC pertama. Penelitian Iro ini mengeksplorasi berupaya bagaimana mandat PBC/PBF diimplementasikan ke dalam praktik operasional di lapangan. Penelitian ini menganalisis apakah PBC/PBF telah memenuhi mandatnya di Sierra Leone untuk: 1) meningkatkan perhatian politik dan komitmen strategis; 2) meningkatkan mobilisasi dan implementasi sumber daya keuangan; 3) memperkuat koordinasi dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan utama.

Tarus (2010) menulis mengenai penilaian terhadap keefektifan berbagai operasi pasukan perdamaian yang ditempatkan di Afrika yang diantaranya terdapat UNAMSIL, MONUC, dan UNAMID. Tarus melakukan sebuah analisis komparasi antara ketiga pasukan perdamaian tersebut dengan melakukan penelusuran terhadap faktor yang menentukan keberhasilan atau berkontribusi terhadap kegagalan misi penjagaan perdamaian PBB di Afrika. Berdasarkan penilaian menyeluruh dari tiga studi kasus berbagai misi perdamaian di Afrika, Tarus memberikan identifikasi delapan faktor yang, menurutnya, dapat berkontribusi pada efektivitas misi PBB di Afrika. Faktor-faktor ini diantaranya

adalah efektivitas mandat PBB, kendali sumber daya alam yang ditemukan di wilayah misi yang memicu konflik, komitmen aktor utama terhadap perjanjian perdamaian, kapasitas dan kemampuan pasukan penjaga perdamaian misi PBB, efektivitas embargo ekonomi dan sanksi, pengaruh aktor utama dan kerja sama aktor regional, efektivitas kepemimpinan PBB dalam misi, dan efektivitas intervensi organisasi regional di wilayah misi sebelum penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Posisi penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang keberhasilan dan tantangan misi UNAMSIL dalam mengelola konflik internal di Sierra Leone. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena secara komprehensif mengkaji bagaimana proses perdamaian yang diinisiasi oleh UNAMSIL di Sierra Leone, dengan penekanan pada kondisi sosial-politik yang mendasari kehadiran pasukan tersebut. Penelitian ini tidak hanya fokus pada tahapan pelucutan senjata, namun juga mengeksplorasi dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program perdamaian. Selain itu, penelitian ini menyoroti koordinasi yang dilakukan antara pasukan perdamaian UNAMSIL, pemerintah Sierra Leone, dan kelompok pemberontak, terutama dalam mengimplementasikan perjanjian Lome. Selanjutnya, penelitian ini mengulas bagaimana perubahan kondisi sosial dan politik terjadi menjelang penarikan pasukan UNAMSIL, memberikan gambaran holistik mengenai dampak jangka panjang dari operasi penjaga perdamaian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian peneliti adalah Peranan United Nation Mission In Sierra Leone (UNAMSIL) dalam Operasi Penjaga Perdamaian Tahun 1999-2005. Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis akan membagi fokus penelitian dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Umum Politik dan Sosial Negara Sierra Leone Pada Masa Kedatangan UNAMSIL
2. Bagaimana Kiprah Pasukan Perdamaian UNAMSIL di Negara Sierra Leone tahun 1999-2005
3. Bagaimana Masa Terakhir Penugasan Pasukan Perdamaian UNAMSIL di Negara Sierra Leone?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai Peranan United Nation Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) dalam Operasi Penjaga Perdamaian Tahun 1999-2005 yang akan dijabarkan ke dalam beberapa poin berdasarkan dengan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini :

1. Menjelaskan Gambaran Umum Negara Sierra Leone serta Kondisi Politik dan Sosial di Sierra Leone Pada Masa Kedatangan UNAMSIL
4. Menganalisis Kiprah Pasukan Perdamaian UNAMSIL di Negara Sierra Leone tahun 1999-2005
5. Meninjau Masa Terakhir Penugasan Pasukan Perdamaian UNAMSIL di Negara Sierra Leone

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi berharga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks penulisan sejarah operasi penjaga perdamaian, khususnya dalam rentang waktu 1999-2005 di Sierra Leone.
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap dinamika peran United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL), menambah dimensi pada wacana ilmiah mengenai operasi perdamaian PBB.
3. Menjadi sumber pengetahuan dan referensi penting dalam domain sejarah lembaga internasional, khususnya mengenai UNAMSIL dalam menjalankan misi perdamaian di Sierra Leone. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah terkait operasi penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik, memberikan perspektif yang lebih kaya dan terperinci terhadap tantangan dan keberhasilan yang dihadapi UNAMSIL.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat digunakan sebagai sumber materi pengajaran yang mendalam mengenai peran dan dampak UNAMSIL dalam operasi penjaga perdamaian di Sierra Leone pada tahun 1999-2005. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan pihak-pihak yang tertarik terhadap studi perdamaian dan keamanan internasional.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan strategis dan operasional lembaga internasional dalam penanganan konflik. Hasil penelitian dapat menjadi referensi penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang perdamaian internasional untuk merancang langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan misi perdamaian di wilayah konflik.
3. Diharapkan dapat menjadi gambaran komprehensif tentang pengembangan kelembagaan penyelenggaraan misi perdamaian PBB di Sierra Leone, memberikan panutan dan pembelajaran yang berharga bagi misi-misi perdamaian serupa di masa mendatang. Kesimpulan dan temuan penelitian

ini diharapkan dapat menjadi acuan positif bagi perencanaan dan pelaksanaan operasi perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik global.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2019, diketahui bahwa struktur organisasi penulisan skripsi sendiri terdiri dari:

Bab I Pendahuluan akan berisi mengenai segala hal yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini seperti: 1) Latar belakang penelitian, bagian ini memaparkan konteks penelitian yang dilakukan; 2) Rumusan masalah, bagian ini memuat identifikasi spesifik mengenai permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan penelitian; 3) Tujuan penelitian, keberadaan tujuan penelitian pada dasarnya merupakan cerminan dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti; 4) Manfaat penelitian, bagian ini menggambarkan nilai lebih atau kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti; dan 5) Struktur organisasi skripsi, bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi dengan memberikan gambaran isi dari setiap bab.

Bab II berisi Kajian Pustaka akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan konten penelitian seperti konsep atau teori yang menjadi acuan dalam keterkaitannya dengan konten penelitian. Selain itu pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini serta sebagai upaya untuk terhindar dari plagiarisme penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai metode-metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode historis. Selain itu, proses penelitian sendiri disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI dan berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Bab IV Temuan dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Peranan United Nations Mission In Sierra Leone (UNAMSIL) dalam Operasi Penjaga Perdamaian Tahun 1999-2005. Temuan-temuan yang berhasil

ditemukan dari sumber yang merupakan bagian dari metode penelitian yang diolah menjadi suatu pembahasan dan menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi ini merupakan bab terakhir yang disajikan dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dari berbagai temuan dan pembahasan yang didapat dari bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan rekomendasi untuk hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian seperti rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai konten yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.